BADAN STANDARDISASI NASIONAL

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT
PENGUATAN PENERAPAN
STANDAR DAN PENILAIAN
KESESUAIAN **TAHUN 2019**

PERIODE RENSTRA
TAHUN **2015-2019**

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PENGUATAN PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN
TAHUN 2019
(Periode Renstra Tahun 2015-2019)

KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STÁNDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

JAKARTA

2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

KATA PENGANTAR …….. ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA 7

2.1 Visi dan Misi ……..… 7

2.2 Tujuan dan indikator kinerja …..... 8

2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja …….. 9

BAB III ARAH KEBIJAKAN..... 11

BAB IV PENUTUP..... 16

LAMPIRAN 1 – Matriks Kinerja dan Penganggaran

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja dan pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Renstra Direktorat ini disusun berdasarkan Renstra organisasi di atasnya, yaitu Renstra Kedeputian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan Renstra Badan Standardisasi Nasional tahun 2015-2019.

Direktorat ini baru terbentuk akhir tahun 2018, Renstra ini disusun untuk tahun 2019, mengikuti masa Renstra Badan Standardisasi Nasional tahun 2015-2019. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dengan adanya Renstra ini diharapkan akan mampu menjadi dokumen acuan dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja yang ditetapkan.

Harapan kami semoga Renstra ini dapat memberikan konstribusi meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Direktur Penguatan Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian

BAB I

PENDAHULUAN

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.

Revisi Renstra BSN ini merupakan revisi tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra tahun 2015-2019. Revisi Renstra dilakukan karena adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Perubahan organisasi ini menyebabkan adanya penambahan fungsi di BSN, perubahan nomenklatur unit kerja dan penganggaran, serta perubahan Indikator Kinerja.

Selanjunya revisi Renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019) menjadi acuan dalam penyusunan Renstra unit kerja dibawahnya dalam hal ini Renstra Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019.

1.1 Kondisi Umum

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan salah satu unit organisasi baru yang ditetapkan berdasarkan Keppres No. 4 tahun 2018 dimana tugas Direktorat ini merupakan pengabungan dari tugas di Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan dan Pusat Sistem Penerapan Standar pada Struktur Organisasi BSN yang lama.

BSN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa

BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
e. Deputi Bidang Akreditasi;
f. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
g. Inspektorat;
h. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
i. Pusat Data dan Sistem Informasi.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit kerja tersebut adalah Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Tugas pokok Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kebijakan internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standard an penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;

c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan

d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Struktur organisasi Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

a. Subdirektorat Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian;

b. Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha;

c. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, serta penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Subdirektorat Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

a. Seksi Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian; dan

b. Seksi Partisipasi Masyarakat.

Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pelaku usaha dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha terdiri atas:

a. Seksi Fasilitasi Industri dan Organisasi Publik; dan

b. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Kecil.

Subdirektorat Fasiltasi Lembaga Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

a. Seksi Fasilitasi Laboratorium; dan

b. Seksi Fasilitasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

Struktur Organisasi Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat dilihat pada Gambar 1.1.

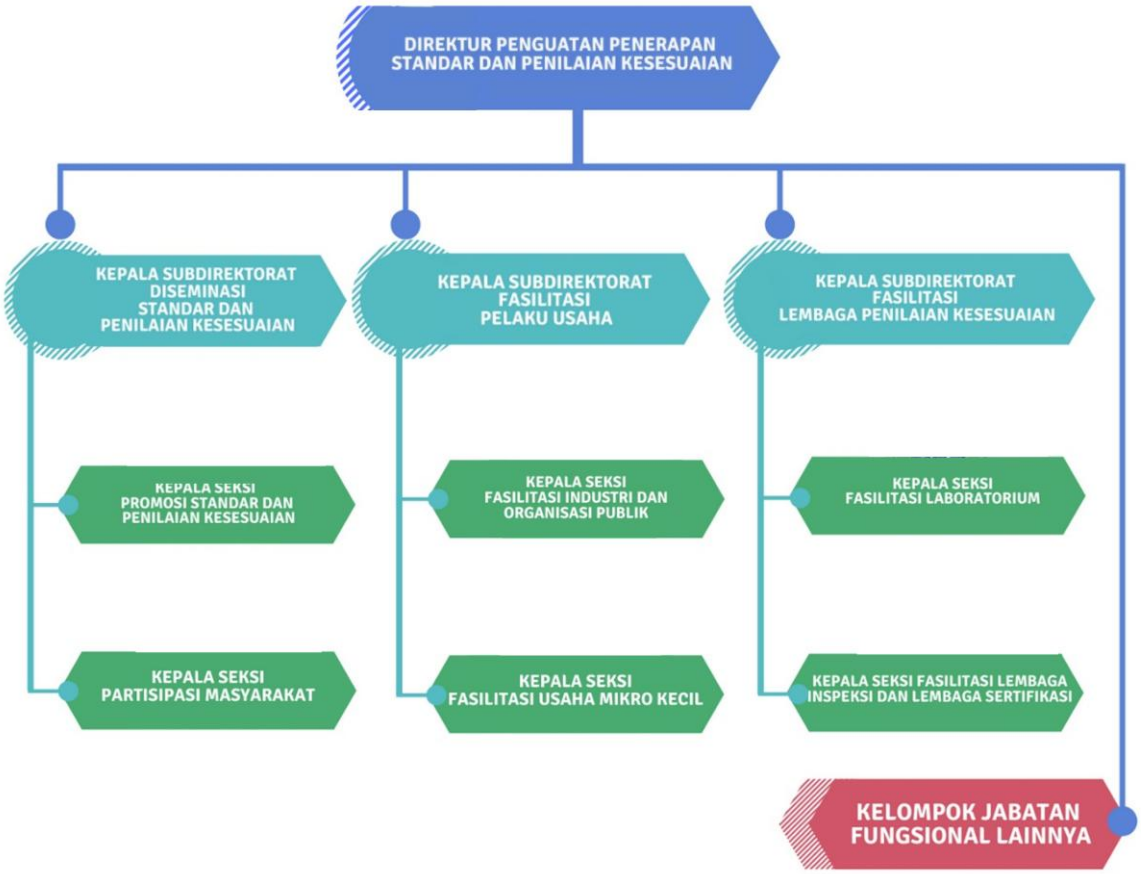

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder sebagai mitra kerjasama. Kebutuhan pelaku usaha akan penerapan SNI semakin meningkat seiring dengan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya SNI. Namun keterbatasan sumber daya membuat tidak semua permintaan pelaku usaha khususnya UMK dapat terfasilitasi dalam penerapan dan sertifikasi SNI. Untuk itu diperlukan sinergi dengan berbagai pihak baik dari unsur pembina UMK di instansi pemerintah, perguruan tinggi maupun di komunitas usaha mikro kecil.

Disamping itu, kebutuhan penerapan SNI juga belum didukung ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian yang sesuai dengan ruang lingkup produk dan juga penyebaran LPK belum merata. Untuk itu, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian perlu melakukan pembinaan kepada LPK untuk memenuhi

kebutuhan penerapan SNI khususnya produk unggulan daerah. Potensi, permasalahan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dijabarkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan pembinaan dalam penerapan SNI meningkat	1.1. Biaya pendampingan penerapan SNI terbatas 1.2. Keterbatasan waktu SDM Pembina penerapan SNI	1.1.1. Sinergi dengan berbagai pihak untuk membantu pembiayaan sertifikasi 1.1.2. Pendekatan kepada lembaga sertifikasi untuk memberikan keringanan biaya untuk UMKM 1.1.3. Penguatan Komitmen Pembina pelaku usaha
2. Pembina UMKM di Indonesia cukup banyak tersebar di beberapa wilayah	1.1. Masih sedikitnya pembina UMKM yang memiliki pengetahuan/ keahlian/ pengalaman dalam mendampingi UMKM dalam menerapkan SNI	2.1.1.Peningkatan kompetrensi (capacity building) Pembina UMKM dalam menerapkan SNI melalui training/ magang/ e-learning, dll 2.1.2. Memperluas jaringan Pembina/ Membuat forum Fasilitator SNI 2.1.3. Memperbanyak pembina pelaku usaha khususnya di daerah
3. Produk ber-SNI yang beredar di masyarakat semakin meningkat jumlahnya	3.1. SNI belum menjadi acuan masyarakat dalam memilih sebuah produk	3.1.1. Melakukan diseminasi SPK secara luas ke berbagai segmen masyarakat melalui berbagai media dan metode komunikasi
4. Kebutuhan LPK semakin meningkat baik lingkup yang baru maupun daerah/kawasan yang belum berkembang	4.1. Masih banyaknya SNI yang belum didukung oleh LPK yang telah diakreditasi 4.2. Terbatasnya jumlah LPK di Kawasan tertentu, terutama Indonesia baian Timur	4.1.1. Melakukan sosialisasi/ bimbingan teknis penyiapan LPK yang mendukung penerapan SNI untuk dapat diakreditasi 4.1.2. Kerjasama dengan Direktorat SPSPK dalam upaya penunjukan LPK untuk menambah ruang lingkup sesuai kebutuhan 4.2.1. Mendorong berkembangnya LPK di daerah/Kawasan yang belum tersedia untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah

BAB II

VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan turunan dari sesuai dengan Visi BSN Tahun 2015-2019 yaitu:

MISI

" Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan salah satu unit organisasi baru yang ditetapkan berdasarkan Keppres No. 4 tahun 2018 dimana tugas Direktorat ini merupakan pengabungan dari tugas di Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan (PUSIKMAS) dan Pusat Sistem Penerapan Standar (PSPS). Untuk itu perencanaan strategis Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesessuaian dirumuskan mengacu pada visi misi pada Rencana strategis 2015-2019 kedua unit tersebut.

Adapun Rumusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) pada Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dan Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Visi dan Misi Direktorat berdasarkan Rencana Strategis Unit Kerja sebelumnya

	PUSDIKMAS	**PSPS**
VISI	Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Berorientasi Standar	Terwujudnya sistem dan kapasitas infrastruktur penerapan standar yang handal untuk meningkatkan daya saing produk dan kualitas hidup bangsa
MISI	**Mengembangkan dan melaksanakan edukasi publik di bidang Standardisasi dan penilaian kesesuaian**	1. Mengembangkan dan menguatkan sistem dan skema penilaian kesesuaian untuk mendukung Penerapan Standar Nasional Indonesia; **2. Mengembangkan sistem dan pembinaan infrastuktur lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia;** 3. Mengembangkan dan menguatkan sistem pemantauan dan pengaduan Penerapan Standar Nasional indonesia;

Sehingga Visi dan Misi Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat dirimuskan sebagai berikut :

Visi:

Terwujudnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang kuat dalam mendukung infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa

Misi :

a. Mengembangkan dan melaksanakan diseminasi di bidang standar dan penilaian kesesuaian
b. Mengembangkan sistem dan pembinaan infrastuktur lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia

2.2 Tujuan dan Indikator Kinerja

Tujuan dan indikator kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian diturunkan berdasarkan Tujuan dan indikator kinerja Kedeputian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019. Adapun Tujuan dan indikator kinerja Kedeputian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Kedeputian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2019
Customer Perspectives		
1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk berstandar di pasar domestik Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2,5 %
	2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	1 %
	3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Nilai efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4,40
Internal Process Perspectives		
2. Meningkatkan Penerapan SNI oleh	4. Persentase Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterapkan	10

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2019
pelaku usaha/organisasi	5. Jumlah organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	14000 organisasi
3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	6. Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI	70
	7. Jumlah keberterimaan sistem SPK di forum bilateral, regional, dan multilateral	5 FTA/ CEPA/ PTA yang memiliki Chapter TBT / STRACAP
Learning and Growth Perspectives		
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	8. Persentase realisasi anggaran Kedeputian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	97 %

Tabel 2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Meningkatkan Penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi	1. Persentase Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterapkan	10
	2. Jumlah organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	14000 organisasi

2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Customer Perspectives		
1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk berstandar di pasar domestik Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2,5 %
	2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	1 %
	3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Nilai efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4,40
Internal Process Perspectives		
2. Meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi	4. Persentase Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterapkan	11 %
	5. Jumlah orgariisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	14.000 Pelaku Usaha
	6. Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI	80 Pelaku usaha
	7. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI	150 Pelaku Usaha
	8. Jumlah SNI yang didiseminasikan	350 SNI
3. Meningkatkan kemampuan LPK dalam mendukung penerapan	9. Jumlah LPK yang berhasil difasilitasi dalam mendukung penerapan SNI dan siap diakreditasi KAN	10 LPK
Learning and Growth Perspectives		
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	10. Persentase realisasi anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	97 %

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan membuat peta strategis sebagai berikut:

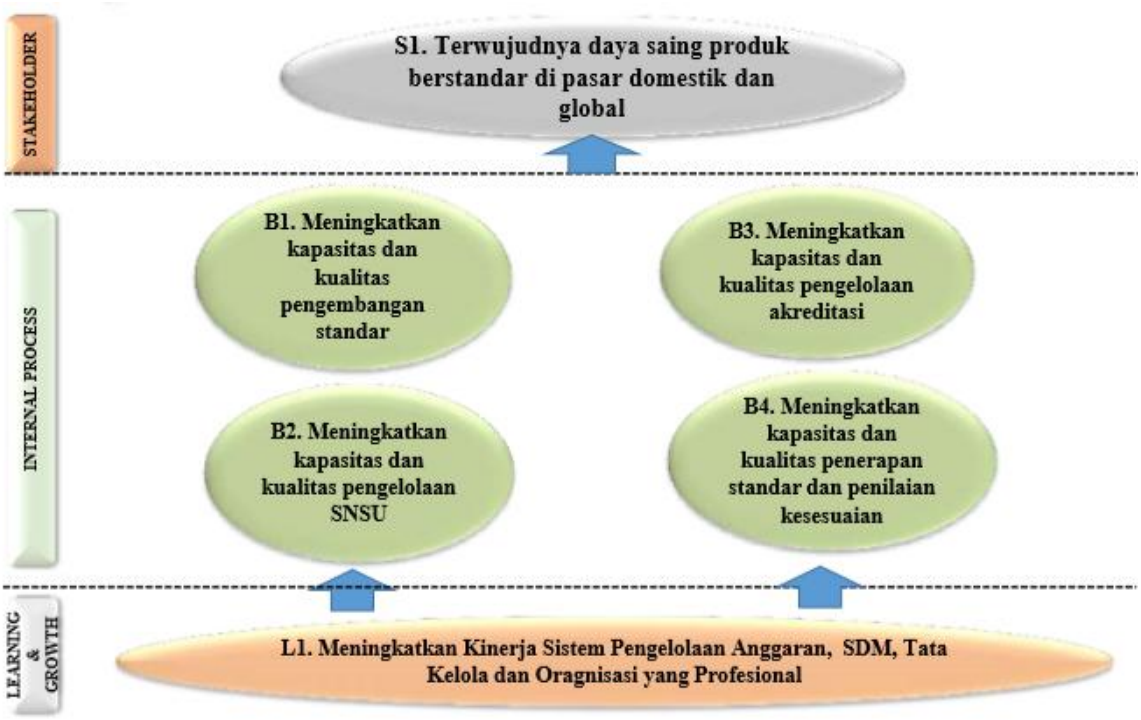

Gambar 3.1 Peta Strategis BSN Tahun 2019

Berdasarkan peta strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2019 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Arah kebijakan 1: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengembangan standar

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan**

  Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan dimana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir.

Arah kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 2: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional**

  Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga.

Arah kebijakan 3: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global**

  Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

Arah kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 4: Meningkatkan penerapan standar sesuai kebutuhan**

  Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional.

Arah kebijakan 5: Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi yang Profesional

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 5: Meningkatkan Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi**

  Strategi ini lebih difokuskan pada optimasi penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, penyediaan SDM profesional, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundangan-undangan, pengelolaan kerja sama, kehumasan, dokumentasi dan informasi, serta riset, pengawasan dan dukungan IT dalam rangka memberikan dukungan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

Dari kelima arah kebijakan BSN tersebut, arah kebijakan yang terkait dengan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah

arah kebijakan arah kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan:
  a. Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan fokus kegiatan antara lain penyelesaian aturan sebagai turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2014 dalam bentuk peraturan presiden, peraturan menteri, maupun peraturan dan keputusan kepala badan;
  b. Peningkatan Akreditasi Laboratorium, dengan fokus kegiatan antara lain (1) pelaksanaan sistem akreditasi laboratorium dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional; (2) peningkatan layanan akreditasi LPK; serta (3) fasilitasi metrologi dan SNSU melalui pembangunan laboratorium SNSU;
  c. Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, dengan fokus kegiatan antara lain (1) pelaksanaan sistem akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional; (2) peningkatan layanan akreditasi LPK;
  d. Peningkatan Data dan Sistem Informasi, dengan fokus kegiatan antara lain penguatan sistem informasi dan dokumentasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang memperhatikan ketersediaan, keutuhan, kerahasiaan, kemudahan dan kecepatan akses informasi elektronik, sehingga memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dapat dimanfaatkan sebagai basis ekspor komoditas unggulan nasional ke pasar global;
  e. Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dengan fokus kegiatan antara lain untuk (1) peningkatan awareness standardisasi dan penilaian kesesuaian kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan komitmen mereka untuk menerapkan SNI; (2) fasilitasi peningkatan kemampuan industri khususnya usaha kecil dan mikro untuk menerapkan standar; (3) fasilitasi pengembangan LPK untuk mendukung penerapan standar sehingga dapat di akreditasi oleh KAN;
  f. Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan fokus kegiatan antara lain (1) riset untuk mendukung pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian di tingkat nasional, regional maupun internasional; (2) riset untuk mendukung semua tugas dan fungsi unit kerja BSN, termasuk kebutuhan riset untuk penyusunan perencanaan strategis; (3) penguatan sistem pendidikan standardisasi di tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi untuk berbagai cabang ilmu pengetahuan;
  g. Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui

penguatan sistem pengembangan SNI bidang Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal; serta (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik;

h. Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penerapan Kesesuaian, dengan fokus kegiatan antra lain (1) penguatan sistem penerapan standar; (2) pelaksanaan uji petik untuk mengetahui efektifitas penerapan SNI; untuk memastikan bahwa penerapan standar dapat mendukung tujuan perumusan standar serta memberikan nilai tambah kepada produsen nasional di pasar domestik maupun negara tujuan ekspor (3) Pemenuhan kewajiban intemasional.

i. Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, dengan fokus pemeliharaan dan perluasan pengakuan sistem akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi di tingkat regional/intemasional dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat intemasional dan kebutuhan nasional;

j. Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radisasi dan Biologi, dengan fokus penguatan metrologi dan Standar Nasional Satuan Ukuran bidang Mekanika, Radisasi dan Biologi;

k. Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia, dengan fokus penguatan metrologi dan Standar Nasional Satuan Ukuran bidang Termoelektrik dan Kimia;

l. Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi, dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi; serta (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik;

m. Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif, dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif; serta (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyairatan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global;

- **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BSN lainnya**, yang mencakup kegiatan:

  a. Peningkatan pelayanan sumber daya manusia, organisasi dan hukum BSN, dengan fokus kegiatan berupa layanan antara lain (1) layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM); (2) layanan hukum; dan (3) layanan reformasi birokrasi.

  b. Peningkatan perencanaan, keuangan dan umum BSN, dengan fokus kegiatan berupa layanan antara lain (1) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; (2) layanan perencanaan; (3) layanan manajemen keuangan; (4) layanan manajemen BMN; (5) layanan umum; dan (6) layanan perkantoran.

  c. Peningkatan pelayanan humas, kerjasama dan layanan informasi, dengan fokus kegiatan antara lain (1) dukungan pengelolaan kerja sama; (2) dukungan informasi dan perpustakaan; dan (3) layanan humas dan informasi.

  d. Peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal BSN, dengan fokus kegiatan berupa layanan audit internal.

  Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional.

Selanjutnya, kebutuhan anggaran program dan kegiatan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2019

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja selama lima tahun. Namun sehubungan dengan adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019). Perubahan Renstra BSN tahun 2015-2019 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan renstra unit kerja dibawahnya secara berjenjang.

Renstra Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2019 yang merupakan bagian dari periode renstra tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2015-2019, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan untuk mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan.

LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Penganggaran Tahun 2019

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2019		2019		
084	**BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)**					**230.837.878**		
		Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global						
		- *Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)*		**2,5**	**%**			
		- *Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri*		**1**	**%**			
		- *Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*		**4,4**	**Nilai**			
06	**Program Pengembangan Standardisasi Nasional**					**117.051.701**		
		Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar						
		- *Jumlah SNI yang ditetapkan*		***12.703***	**SNI**			
		- *persentase SNI yang harmonis dengan standar internasional*		***50***	***%***			
		Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran						
		- *Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)*		***100.000***	***sertifikat***			

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2019		2019		
		- *Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui internasional*		***130***	***kemampuan pengukuran***			
		Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi						
		- *Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi*		**2134**	**LPK**			
		- *Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional*		***12***	**skema**			
		Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Ppenerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian						
		- *Persentase SNI yang diterapkan*		***10***	***%***			
		- *Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI*		***70***	***%***			
3553	**Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**		**Jakarta**			**827.589**	**SDMOH**	
		Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian						
		- *Jumlah Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*		**10**	**Peraturan**			
3554	**Peningkatan Akreditasi Laboratorium**		**Jakarta**			**65.441.615**	**AL**	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi						
		- *Jumlah Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan yang di akreditasi*		**1.751**	**Penilaian Akreditasi**			
		- *Jumlah Pengakuan akreditasi Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi secara internasional*		***4***	**skema**			

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2019		2019		
		- *% proses waktu akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi dan prosedur bahan acuan kurang dari 12 bulan*		***100***	**%**			
3555	**Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi**		**Jakarta**			**6.415.422**	**ALIS**	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi						
		- *Jumlah lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi yang di akreditasi*		**383**	**LPK**			
		- *Jumlah pengakuan akreitasi Lembaga Inspeksi dan lembaga sertifikasi secara internasional*		**7**	**skema**			
		- *% proses waktu akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi kurang dari 12 bulan*		***100***	**%**			
3556	**Peningkatan Data dan Sistem Informasi**		Jakarta			**2.404.291**	**PUSDATIN**	
		Meningkatkan pengembangan Infrastruktur dan keamanan informasi						
		- *Tingkat downtime infarstruktur TI dan jaringan*		***1***	**%**			
		- *Tingkat penyelesaian Grand Design TI*		***100***	**%**			
		Meningkatkan pengembangan sitem informasi dan tata kelola data						
		- *Jumlah Aplikasi Sistem Informasi yang dipelihara dan dikembangkan sesuai grand design TI*		***30***	**aplikasi**			
		- *Jumlah SNI yang diakses*		***4000***	**judul**			
		- *Jumlah pengunjung system informasi SPK*		***1.760.000***	**pengunjung**			
3558	**Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian**		**Jakarta**			**12.040.034**	**PPSPK**	
		Meningkatkan Penerapan SNI oleh Pelaku Usaha/organisasi						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2019		2019		
		- *% SNI yang diterapkan*		**10**	**%**			
		- *Jumlah organisasi yang menerapkan SNI*		**14.000**	**organisasi**			
		- *Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI*		**150**	**Pelaku usaha**			
		- *Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI*		***80***	**Pelaku usaha**			
		- *Jumlah SNI yang didiseminasikan*		**350**	**SNI**			
		Meningkatkan kemampuan LPK dalam mendukung penerapan SNI						
		- *Jumlah LPK yang berhasil difasilitasi dalam mendukung penerapan SNI dan siap diakreditasi KAN*		**10**	**LPK**			
3559	**Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**Jakarta**			**4.841.985**	**PUSRISBANG**	
		Meningkatkan mutu hasil litbang standardisasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan						
		- Jumlah rekomendasi kebijakan/keputusan hasil riset yang dimanfaatkan internal dan eksternal BSN		***40***	**rekomendasi**			
		- Jumlah KTI dari hasil penelitian yang diterbitkan dalam publikasi nasional maupun internasional		***55***	**KTI**			
		- Jumlah Sitasi KTI yang di publikasikan		***1096***	**sitasi**			
		- Jumlah prototype hasil penelitian		***5***	**prtotipr/purwarupa**			
		- *Jumlah HAKI yang berhasil didapatkan*		**2**	**paten sederhana**			
		meningkatka publikasi di bidang standardisasi						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2019		2019		
		- *Jumlah publikasi yang ter-indeks internasional*		78	nilai			
		Menumbuhkembangkan budaya standar melalui peningkatan kompetensi SDM di bidang SPK						
		- *% peningkatan kompetensi SDM SPK melalui layanan pelatihan dengan predikat minimal "Baik"*		70	*%*			
		- *Jumlah role model pendidikan tinggi dengan learning outcome berbasis SPK*		21	*PT*			
		- *% SDM internal yang ditingkatkan kompetensinya di bidang SPK*		15	*%*			
		Meningkatkan kompetensi peneliti SPK						
		- Jumlah peneliti bidang SPK yang terinddeks global		58	*peneliti*			
3560	**Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal**		**Jakarta**			**6.243.076**	**AK2H**	
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan halal						
		- *Jumlah SNI yang ditetapkan*		*250*	SNI			
		- *Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI*		*300*	rekomedasis			
		- *% tindak lanjut PNPS*		*50*	%			
		- *% pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar*		95	%			
		Meningkatkan pengembangan standar internasional bidang Agro, Kimia, Kesehatan dan halal						
		- *Jumlah usulan rancangan standar internasional yang diajukan oleh Indonesia*		1	dokumen			

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2019		2019		
3561	**Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian**		**Jakarta**			**4.910.422**	**SPSPK**	
		Meningkatkan pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian						
		- *Jumlah skema penerapan SNI yang ditetapkan*		**225**	**jumlah skema**			
		Meningkatakan sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian						
		- *% jumlah notifikasi dan penanganan enquiry yang di tanggapi*		**100**	**%**			
		Regulasi yang Diharmonisasikan berdasarkan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian						
		- *% produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI*		**70**	**%**			
		Regulasi yang Diharmonisasikan berdasarkan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian						
		- *Jumlah keberterimaan system SPK di forum bilateral, regional dan internasional*		**5**	**FTA/cepa/pta yang ada chapter TBT**			
		- *% kepentingan Indonesia di bidang SPK yang diprjuangkan di forum Bilateral, regional dan multilateral*		**100**	**%**			
4177	**Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi**		**Jakarta**			**6.670.000**	**SISHAR**	
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem harmonisasi akreitasi						
		- *Jumlah pengakuan Skema akreditasi secara internasional*		**12**	**Skema Akreditas**			
		- *Jumlah skema akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan*		**30**	**skema**			
		- *% pemeliharaan kebijakan akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi*		**100**	**%**			

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2019		2019		
4178	**Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika. Radiasi dan Biologi**		**Jakarta**			**2.269.491**	**SNSU-MRB**	
		Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran						
		- *Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan*		*750*	*sertifikat*			
		- *Jumlah Kebijakan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi*		*3*	*dokumen*			
		- *Jumlah kunjungan praktisi ke laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi*		*120*	*orang*			
		- *Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi*		*61*	*jenis layanan*			
		- *Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi*		*62*	*jenis layanan*			
		- *Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)*		*30*	*orang kali*			
		- *Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional*		*10*	*orang kali*			
		- *Jumlah posisi dan peran strategis dalam organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional*		*3*	*posisi*			
		- *Jumlah perusahaan yang dilayani*		*100*	*perusahaan*			
		- *Jumlah masyarakat yang mengakses informasi dan layanan berbasis online*		*150*	*pengunjung*			

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2019		2019		
		- *Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat, dan pelatihan*		*45*	*orang*			
		- *Jumlah peserta sosialisasi dan workshop kemetrologian*		*250*	*peserta*			
4179	**Peningkatan Standar nasional Satuan Ukuran Termoelekektrik dan Kimia**					**2.609.171**	**SNSU-TK**	
		Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran						
		- *Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan*		*750*	*sertifikat*			
		- *Jumlah Kebijakan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia*		*3*	*dokumen*			
		- *Jumlah kunjungan praktisi ke laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia*		*120*	*orang*			
		- *Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional bidang Termoelektrik dan Kimia*		*69*	*jenis layanan*			
		- *Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi bidang Termoelektrik dan Kimia*		*64*	*jenis layanan*			
		- *Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (lembaga penilai kesesuaian)*		*30*	*orang kali*			
		- *Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional*		*10*	*orang kali*			
		- *Jumlah posisi dan peran strategis dalam organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional*		*4*	*posisi*			

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2019		2019		
		- *Jumlah perusahaan yang dilayani*		*100*	*perusahaan*			
		- *Jumlah masyarakat yang mengakses informasi dan layanan berbasis online*		*150*	*pengunjung*			
		- *Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat, dan pelatihan*		*45*	*orang*			
		- *Jumlah peserta sosialisasi dan workshop kemetrologian*		*250*	*peserta*			
4180	**Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi**					**1.019.832**	**METTI**	
		Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi						
		- *Jumlah SNI yang ditetapkan*		**125**	**SNI**			
		- *Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI*		**50**	**rekomendasi**			
		- *Persentase tindak lanjut PNPS*		**50**	**%**			
		- *Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar*		**95**	**%**			
4181	**Peningkatan Pengembangan Standar Infrastuktur, Penilaian Kesesuain, Personal dan Ekonomi Kreatif**					**1.358.773**	**IPPE**	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2019		2019		
		Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif						
		- *Jumlah SNI yg ditetapkan*		**125**	**SNI**			
		- *Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI*		**50**	**rekomendasi**			
		- *Persentase tindak lanjut PNPS*		**50**	**%**			
		- *Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar*		**95**	**%**			
01	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN**					**114.686.177**		
		Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional						
		- *Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi*		**75.01**	**Nilai**			
		- *Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja*		**70 (BB)**	**Nilai**			
		- *Opini atas Laporan Keuangan*		**WTP**	**Opini**			
		- *% Penerapan Budaya Kerja BSN*		**70,0**	**%**			
3549	**Peningkatan Pelayanan Sumberdaya Manusia, Organisasi dan Hukum BSN**					**5.227.407**	**BIRO SDMOH**	
		Meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Manusia						
		- *Persentase pemenuhan ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi*		*100*	*%*			
		- *Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan*		*3*	*dokumen*			
		Meningkatkan kinerja pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana						
		- *Persentase ASN BSN yang diases berdasarkan standar kompetensi*		*2*	*%*			

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2019		2019		
		- *Persentase pemenuhan ASN BSN sesuai ABK*		*60*	*%*			
		- *Persentase pelaksanaan sistem manajemen mutu*		*100*	*%*			
		Meningkatkan kinerja pengelolaan Hukum						
		- *Jumlah peraturan perundang – undangan*		*22*	*Peraturan*			
		- *Jumlah Keputusan Kepala BSN*		*530*	*dokumen*			
		- *Jumlah penyuluhan hukum*		*22*	*penyuluhan hukum*			
3550	**Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Umum**					**105.796.457**	**BIRO PKU**	
		Terselenggaranya penyusunan anggaran dan pelaksanaan monev yang efektif dan akuntabel						
		- *Persentase penyelesaian dan penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran yang tepat waktu*		*100*	*%*			
		- *Persentase penyelesaian dan penyampaian laporan kinerja tepat waktu*		*70*	*%*			
		- *Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti*		*70*	*%*			
		Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel						
		- *Persentase kesesuaian penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu*		*100*	*%*			
		- *Persentase penyampaian laporan PNBP tepat waktu*		*100*	*%*			
		Terkelolanya pelayanan administrasi dan ketatausahaan yang sistematis						
		- *Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN*		*100*	*%*			
3551	**Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN**					**836.633**	**INSPEKTORAT**	
		Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2019		2019		
		- *Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat*		*80*	*nilai*			
		Terwujudnya good governance dan clean government						
		- *Zona integritas WBK/WBBM*		*2*	*zona*			
		Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal BSN						
		- *Nilai Maturitas SPIP*		*3.2*	*level*			
		Meningkatkan kualitas proses pengawasan dan pengendalian internal						
		- *Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK*		*100*	*%*			
		- *Persentase penyelesaian dokumen Rencana Tindak Pengendalian berdasarkan manajemen resiko*		*100*	*%*			
		- *Persentase rekomendasi hasil pengendalian internal yang ditindaklanjuti*		*100*	*%*			
		- *Jumlah temuan yang berulang*		*15*	*temuan*			
4176	**Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi**					**2.825.680**	**BIRO HKLI**	
		Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Hubungan Masyarakat						
		- *Jumlah Publikasi Kelembagaan*		*1250*	*Publikasi*			
		- *Jumlah Pameran Standardisasi yang diikuti BSN*		*11*	*Pameran*			
		Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri						
		- *Persentase Kerjasama Kelembagaan yang ditindaklanjuti*		*> 77*	*%*			
		- *Jumlah Kerjasama Kelembagaan*		*11*	*Kerjasama*			
		Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Layanan Informasi dan Perpustakaan						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2019		2019		
		- *Jumlah Pemanfaat Layanan Informasi*		*60000*	*Pengunjung*			
		- *Jumlah SNI yang terjual*		*3150*	*SNI*			
		- *Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti*		*100*	*%*			

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEDEPUTIAN BIDANG
PENERAPAN STÁNDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
JAKARTA @2019